



Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran akuntansi nasional dalam pengelolaan beras, khususnya terkait fenomena impor beras yang terus-menerus dan inflasi harga beras di Indonesia. Meskipun impor dilakukan dalam jumlah besar, harga beras di pasar domestik tetap mahal. Fenomena ini mengindikasikan adanya regulasi yang rumit, rendahnya akuntabilitas dinamis, dan praktik oportunitisme ekonomi yang menciptakan oligarki dalam sektor beras. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan pemetaan regulasi menggunakan perangkat lunak NVivo. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola beras di Indonesia dipengaruhi oleh regulasi tumpang tindih, kurangnya integrasi antarlembaga, dan ketiadaan sistem informasi akuntansi yang efektif. Akibatnya, pemerintah tidak dapat secara efektif mengendalikan produksi, distribusi, dan harga beras. Selain itu, praktik manajemen instan dan keterbatasan transfer pengetahuan antara pemerintah pusat dan daerah memperparah situasi. Disertasi ini merekomendasikan reformasi regulasi beras, peningkatan akuntabilitas dinamis, dan adopsi teknologi sistem informasi untuk memperbaiki tata kelola beras di Indonesia. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur akuntansi nasional dan kontribusi praktis bagi kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan beras nasional dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia.

Kata kunci: beras, regulasi rumit, impor, ekspor, harga mahal



Abstract

This study examines the role of national accounting in rice management, particularly regarding the phenomenon of continuous rice imports and rice price inflation in Indonesia. Despite substantial imports, domestic rice prices remain high. This phenomenon indicates the presence of complex regulations, low dynamic accountability, and economic opportunism practices that create oligarchies in the rice sector. This study adopts a qualitative approach using in-depth interviews, document analysis, and regulation mapping with NVivo software. The findings reveal that Indonesia's rice governance is affected by overlapping regulations, a lack of inter-agency integration, and the absence of an effective accounting information system. Consequently, the government struggles to effectively manage rice production, distribution, and pricing. Additionally, instant management practices and limited knowledge transfer between central and regional governments exacerbate the situation. This dissertation recommends reforming rice regulations, enhancing dynamic accountability, and adopting information technology systems to improve rice governance in Indonesia. The study provides theoretical contributions to national accounting literature and practical contributions to government policies related to food security. The findings are expected to serve as a foundation for improving the efficiency of national rice management and supporting long-term food security in Indonesia.

Keywords: rice, complex regulations, import, export, inflation